



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.4, 2015

BKN. Angka Pengenal. Pensiun. PNS. Pembina
Utama Muda. IV/C Ke Atas.

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG

PENETAPAN ANGKA PENGENAL NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS DAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIIL BERPANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA GOLONGAN RUANG IV/C
KE ATAS SELAIN PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIIL YANG MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN TINGGI
UTAMA DAN MADYA SERTA PEJABAT FUNGSIONAL KEAHLIAN UTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negara Sipil Yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c Ke Atas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Penetapan Angka Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis dan Keputusan Kepala

Badan Kepegawaian Negara tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c Ke Atas Selain Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya Serta Pejabat Fungsional Keahlian Utama;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
 3. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c Ke Atas;
 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PENETAPAN ANGKA PENGENAL NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS DAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA GOLONGAN RUANG IV/C KE ATAS SELAIN PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA DAN MADYA SERTA PEJABAT FUNGSIONAL KEAHLIAN UTAMA.

Pasal 1

- (1) Pertimbangan Teknis dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke atas selain pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri

Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya serta Pejabat Fungsional Keahlian Utama meliputi:

- a. Pemberhentian atas permintaan sendiri;
 - b. Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak atas permintaan sendiri;
 - c. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun serta pemberian pensiun Janda/Dudanya;
 - e. Pemberhentian karena meninggal dunia;
 - f. Pemberhentian karena tewas;
 - g. Pemberhentian karena cacat karena dinas serta pemberian pensiun Janda/Dudanya;
 - h. Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia; dan
 - i. Pensiun Janda/Duda pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia.
- (2) Selain Pertimbangan Teknis dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Kenaikan Pangkat Pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, dan cacat karena dinas untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e.

Pasal 2

Penetapan angka pengenal nomor Pertimbangan Teknis dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke atas selain pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama Dan Madya serta Pejabat Fungsional Keahlian Utama adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 3

Angka pengenal nomor Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas 2 (dua) huruf kapital pertama menunjukkan jenis pemberhentian, 5 (lima) digit angka berikutnya menunjukkan kode instansi, dan 6 (enam) digit angka terakhir menunjukkan nomor urut pertimbangan teknis, sehingga seluruhnya menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 4

Angka pengenal nomor Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun serta Kenaikan Pangkat Pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas 5 (lima) digit angka pertama menunjukkan nomor urut keputusan, KEPKA, huruf kapital selanjutnya menunjukkan jenis pemberhentian, 5 (lima) digit angka berikutnya menunjukkan kode instansi, dan 2 (dua) digit angka terakhir menunjukkan tahun penetapan keputusan, sehingga seluruhnya menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 5

Kode instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 6

Pada saat berlakunya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penetapan Angka Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis, Nomor Persetujuan Teknis, dan Nomor Surat/Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara tentang Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penetapan Angka Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis, Nomor Persetujuan Teknis, dan Nomor Surat/Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara tentang Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Januari 2015

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

EKO SUTRISNO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 6 Januari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN ANGKA PENGENAL NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS DAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA GOLONGAN RUANG IV/C KE ATAS SELAIN PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA DAN MADYA SERTA PEJABAT FUNGSIONAL KEAHLIAN UTAMA

ANGKA PENGENAL NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA GOLONGAN RUANG IV/C KE ATAS SELAIN PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA DAN MADYA SERTA PEJABAT FUNGSIONAL KEAHLIAN UTAMA

| NO | JENIS PERTIMBANGAN TEKNIS | KODE |
|----|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Pemberhentian atas permintaan sendiri. | PA- 0000000000 |
| 2 | Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak atas permintaan sendiri. | PB- 0000000000 |
| 3 | Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. | PC- 0000000000 |
| 4 | Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun serta pemberian pensiun janda/dudanya. | PD- 0000000000 |
| 5 | Pemberhentian karena meninggal dunia. | PE- 0000000000 |
| 6 | Pemberhentian karena tewas. | PF- 0000000000 |

| | | |
|----|---|-----------------|
| 7 | Pemberhentian karena cacat karena dinas serta pemberian pensiun janda/dudanya. | PG- 00000000000 |
| 8 | Pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia. | PH- 00000000000 |
| 9 | Pensiun janda/duda pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia. | PI- 00000000000 |
| 10 | Kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, dan cacat karena dinas untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e. | PJ- 00000000000 |

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

EKO SUTRISNO

LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN ANGKA PENGENAL NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS DAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA GOLONGAN RUANG IV/C KE ATAS SELAIN PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA DAN MADYA SERTA PEJABAT FUNGSIONAL KEAHLIAN UTAMA

ANGKA PENGENAL NOMOR KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA GOLONGAN RUANG IV/C KE ATAS SELAIN PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA DAN MADYA SERTA PEJABAT FUNGSIONAL KEAHLIAN UTAMA

| NO | JENIS KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN | KODE |
|----|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Pemberhentian atas permintaan sendiri. | 00000/KEPKA/AP/00000/00 |
| 2 | Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak atas permintaan sendiri. | 00000/KEPKA/TAP/00000/00 |
| 3 | Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. | 00000/KEPKA/TDH/00000/00 |
| 4 | Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun serta pemberian pensiun janda/dudanya. | 00000/KEPKA/AV/00000/00 |
| 5 | Pemberhentian karena meninggal dunia. | 00000/KEPKA/MD/00000/00 |
| 6 | Pemberhentian karena tewas. | 00000/KEPKA/AX/00000/00 |

| | | |
|----|---|--------------------------|
| 7 | Pemberhentian karena cacat karena dinas serta pemberian pensiun janda/dudanya. | 00000/KEPKA/AW/00000/00 |
| 8 | Pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia. | 00000/KEPKA/AY/00000/00 |
| 9 | Pensiun janda/duda pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia. | 00000/KEPKA/AZ/00000/00 |
| 10 | Kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, dan cacat karena dinas untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e. | 00000/KEPKA/KPP/00000/00 |

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

EKO SUTRISNO

LAMPIRAN III
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 1 TAHUN 2015
 TENTANG
 PENETAPAN ANGKA PENGENAL NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS DAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG
 PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 BERPANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA GOLONGAN RUANG IV/C KE ATAS
 SELAIN PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSUN BAGI PEGAWAI NEGERI
 SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA DAN MADYA
 SERTA PEJABAT FUNGSIONAL KEAHLIAN UTAMA

ANGKA KODE INSTANSI PUSAT DAN DAERAH

| NO | NAMA INSTANSI | KODE |
|----|--|-------|
| 1 | Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) | 11001 |
| 2 | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | 11002 |
| 3 | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | 11003 |
| 4 | Kementerian Koordinator Bidang Maritim | 11004 |
| 5 | Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi | 12001 |
| 6 | Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah | 12002 |
| 7 | Kementerian Badan Usaha Milik Negara | 12003 |
| 8 | Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 12004 |
| 9 | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | 12005 |
| 10 | Kementerian Pemuda Olahraga | 12006 |
| 11 | Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 12007 |
| 12 | Kementerian Dalam Negeri | 12008 |
| 13 | Kementerian Luar Negeri | 12009 |
| 14 | Kementerian Pertahanan | 12010 |
| 15 | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | 12011 |
| 16 | Kementerian Keuangan | 12012 |
| 17 | Kementerian Pertanian | 12013 |
| 18 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 12014 |
| 19 | Kementerian Perhubungan | 12015 |
| 20 | Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah | 12016 |
| 21 | Kementerian Kesehatan | 12017 |
| 22 | Kementerian Agama | 12018 |
| 23 | Kementerian Tenaga Kerja | 12019 |
| 24 | Kementerian Sosial | 12020 |
| 25 | Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 12021 |
| 26 | Kementerian Kelautan Dan Perikanan | 12022 |
| 27 | Kementerian Komunikasi dan Informatika | 12023 |
| 28 | Kementerian Perdagangan | 12024 |
| 29 | Kementerian Perindustrian | 12025 |

| | | |
|----|--|-------|
| 30 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 12026 |
| 31 | Kementerian Pariwisata | 12027 |
| 32 | Kementerian Sekretariat Negara | 12028 |
| 33 | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas | 12029 |
| 34 | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | 12030 |
| 35 | Mahkamah Agung Republik Indonesia | 13001 |
| 36 | Kejaksaan Agung | 13002 |
| 37 | Kepolisian Negara | 13003 |
| 38 | Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia | 14001 |
| 39 | Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial | 14002 |
| 40 | Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat | 14003 |
| 41 | Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia | 14004 |
| 42 | Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah | 14005 |
| 43 | Sekretariat Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi | 14006 |
| 44 | Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional | 14007 |
| 45 | Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum | 14008 |
| 46 | Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia | 14009 |
| 47 | Sekretariat Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha | 14010 |
| 48 | Sekretariat Kabinet | 14011 |
| 49 | Sekretariat Presiden | 14012 |
| 50 | Sekretariat Wakil Presiden | 14013 |
| 51 | Badan Kepegawaian Negara | 15001 |
| 52 | Badan Informasi Geospasial | 15002 |
| 53 | Badan Intelijen Negara | 15003 |
| 54 | Badan Keamanan Laut Republik Indonesia | 15004 |
| 55 | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | 15005 |
| 56 | Badan Koordinasi Penanaman Modal | 15006 |
| 57 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | 15007 |
| 58 | Badan Narkotika Nasional | 15008 |
| 59 | Badan Nasional Penanggulangan Bencana | 15009 |
| 60 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme | 15010 |
| 61 | Badan Nasional Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia | 15011 |
| 62 | Badan Nasional Pengelola Perbatasan | 15012 |
| 63 | Badan Pemeriksa Keuangan | 15013 |
| 64 | Badan Pengawas Obat dan Makanan | 15014 |
| 65 | Badan Pengawas Tenaga Nuklir | 15015 |
| 66 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan | 15016 |
| 67 | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi | 15017 |
| 68 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam | 15018 |
| 69 | Badan Pusat Statistik | 15019 |
| 70 | Badan Search And Rescue Nasional (Basarnas) | 15020 |
| 71 | Badan Standardisasi Nasional | 15021 |
| 72 | Badan Tenaga Nuklir Nasional | 15022 |
| 73 | Badan Pengawas Pemilihan Umum | 15023 |
| 74 | Lembaga Administrasi Negara | 15024 |
| 75 | Lembaga Sandi Negara | 15025 |
| 76 | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional | 15026 |

| | | |
|-----|--|-------|
| 77 | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia | 15027 |
| 78 | Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia | 15028 |
| 79 | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | 15029 |
| 80 | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan | 15030 |
| 81 | Ombudsman Republik Indonesia | 15031 |
| 82 | Arsip Nasional Republik Indonesia | 15032 |
| 83 | Perpustakaan Nasional Republik Indonesia | 15033 |
| 84 | Pemerintah Aceh | 21100 |
| 85 | Pemerintah Kabupaten Simeulue | 21101 |
| 86 | Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil | 21102 |
| 87 | Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan | 21103 |
| 88 | Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara | 21104 |
| 89 | Pemerintah Kabupaten Aceh Timur | 21105 |
| 90 | Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah | 21106 |
| 91 | Pemerintah Kabupaten Aceh Barat | 21107 |
| 92 | Pemerintah Kabupaten Aceh Besar | 21108 |
| 93 | Pemerintah Kabupaten Pidie | 21109 |
| 94 | Pemerintah Kabupaten Bireuen | 21110 |
| 95 | Pemerintah Kabupaten Aceh Utara | 21111 |
| 96 | Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya | 21112 |
| 97 | Pemerintah Kabupaten Gayo Lues | 21113 |
| 98 | Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang | 21114 |
| 99 | Pemerintah Kabupaten Nagan Raya | 21115 |
| 100 | Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya | 21116 |
| 101 | Pemerintah Kabupaten Bener Meriah | 21117 |
| 102 | Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya | 21118 |
| 103 | Pemerintah Kota Banda Aceh | 21171 |
| 104 | Pemerintah Kota Sabang | 21172 |
| 105 | Pemerintah Kota Langsa | 21173 |
| 106 | Pemerintah Kota Lhokseumawe | 21174 |
| 107 | Pemerintah Kota Subulussalam | 21175 |
| 108 | Pemerintah Provinsi Sumatera Utara | 21200 |
| 109 | Pemerintah Kabupaten Nias | 21201 |
| 110 | Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal | 21202 |
| 111 | Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan | 21203 |
| 112 | Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah | 21204 |
| 113 | Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara | 21205 |
| 114 | Pemerintah Kabupaten Toba Samosir | 21206 |
| 115 | Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu | 21207 |
| 116 | Pemerintah Kabupaten Asahan | 21208 |
| 117 | Pemerintah Kabupaten Simalungun | 21209 |
| 118 | Pemerintah Kabupaten Dairi | 21210 |
| 119 | Pemerintah Kabupaten Karo | 21211 |
| 120 | Pemerintah Kabupaten Deli Serdang | 21212 |
| 121 | Pemerintah Kabupaten Langkat | 21213 |
| 122 | Pemerintah Kabupaten Nias Selatan | 21214 |
| 123 | Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan | 21215 |

| | | |
|-----|--|-------|
| 124 | Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat | 21216 |
| 125 | Pemerintah Kabupaten Samosir | 21217 |
| 126 | Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai | 21218 |
| 127 | Pemerintah Kabupaten Batubara | 21219 |
| 128 | Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara | 21220 |
| 129 | Pemerintah Kabupaten Padang Lawas | 21221 |
| 130 | Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan | 21222 |
| 131 | Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara | 21223 |
| 132 | Pemerintah Kabupaten Nias Utara | 21224 |
| 133 | Pemerintah Kabupaten Nias Barat | 21225 |
| 134 | Pemerintah Kota Sibolga | 21271 |
| 135 | Pemerintah Kota Tanjung Balai | 21272 |
| 136 | Pemerintah Kota Pematang Siantar | 21273 |
| 137 | Pemerintah Kota Tebing Tinggi | 21274 |
| 138 | Pemerintah Kota Medan | 21275 |
| 139 | Pemerintah Kota Binjai | 21276 |
| 140 | Pemerintah Kota Padangsidimpuan | 21277 |
| 141 | Pemerintah Kota Gunung Sitoli | 21278 |
| 142 | Pemerintah Provinsi Sumatera Barat | 21300 |
| 143 | Pemerintah Kabupaten Kep. Mentawai | 21301 |
| 144 | Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan | 21302 |
| 145 | Pemerintah Kabupaten Solok | 21303 |
| 146 | Pemerintah Kabupaten Sijunjung | 21304 |
| 147 | Pemerintah Kabupaten Tanah Datar | 21305 |
| 148 | Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman | 21306 |
| 149 | Pemerintah Kabupaten Agam | 21307 |
| 150 | Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota | 21308 |
| 151 | Pemerintah Kabupaten Pasaman | 21309 |
| 152 | Pemerintah Kabupaten Solok Selatan | 21310 |
| 153 | Pemerintah Kabupaten Dharmasraya | 21311 |
| 154 | Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat | 21312 |
| 155 | Pemerintah Kota Padang | 21371 |
| 156 | Pemerintah Kota Solok | 21372 |
| 157 | Pemerintah Kota Sawahlunto | 21373 |
| 158 | Pemerintah Kota Padang Panjang | 21374 |
| 159 | Pemerintah Kota Bukittinggi | 21375 |
| 160 | Pemerintah Kota Payakumbuh | 21376 |
| 161 | Pemerintah Kota Pariaman | 21377 |
| 162 | Pemerintah Provinsi Riau | 21400 |
| 163 | Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi | 21401 |
| 164 | Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu | 21402 |
| 165 | Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir | 21403 |
| 166 | Pemerintah Kabupaten Pelalawan | 21404 |
| 167 | Pemerintah Kabupaten Siak | 21405 |
| 168 | Pemerintah Kabupaten Kampar | 21406 |
| 169 | Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu | 21407 |
| 170 | Pemerintah Kabupaten Bengkalis | 21408 |

| | | |
|-----|---|-------|
| 171 | Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir | 21409 |
| 172 | Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti | 21410 |
| 173 | Pemerintah Kota Pekanbaru | 21471 |
| 174 | Pemerintah Kota Dumai | 21472 |
| 175 | Pemerintah Provinsi Jambi | 21500 |
| 176 | Pemerintah Kabupaten Kerinci | 21501 |
| 177 | Pemerintah Kabupaten Merangin | 21502 |
| 178 | Pemerintah Kabupaten Sarolangun | 21503 |
| 179 | Pemerintah Kabupaten Batang Hari | 21504 |
| 180 | Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi | 21505 |
| 181 | Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur | 21506 |
| 182 | Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat | 21507 |
| 183 | Pemerintah Kabupaten Tebo | 21508 |
| 184 | Pemerintah Kabupaten Bungo | 21509 |
| 185 | Pemerintah Kota Jambi | 21571 |
| 186 | Pemerintah Kota Sungai Penuh | 21572 |
| 187 | Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan | 21600 |
| 188 | Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu | 21601 |
| 189 | Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir | 21602 |
| 190 | Pemerintah Kabupaten Muara Enim | 21603 |
| 191 | Pemerintah Kabupaten Lahat | 21604 |
| 192 | Pemerintah Kabupaten Musi Rawas | 21605 |
| 193 | Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin | 21606 |
| 194 | Pemerintah Kabupaten Banyuasin | 21607 |
| 195 | Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Sel. | 21608 |
| 196 | Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | 21609 |
| 197 | Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir | 21610 |
| 198 | Pemerintah Kabupaten Empat Lawang | 21612 |
| 199 | Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara | 21613 |
| 200 | Pemerintah Kota Palembang | 21671 |
| 201 | Pemerintah Kota Prabumulih | 21672 |
| 202 | Pemerintah Kota Pagar Alam | 21673 |
| 203 | Pemerintah Kota Lubuk Linggau | 21674 |
| 204 | Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | 21675 |
| 205 | Pemerintah Provinsi Bengkulu | 21700 |
| 206 | Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan | 21701 |
| 207 | Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong | 21702 |
| 208 | Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara | 21703 |
| 209 | Pemerintah Kabupaten Kaur | 21704 |
| 210 | Pemerintah Kabupaten Seluma | 21705 |
| 211 | Pemerintah Kabupaten Mukomuko | 21706 |
| 212 | Pemerintah Kabupaten Lebong | 21707 |
| 213 | Pemerintah Kabupaten Kepahiang | 21708 |
| 214 | Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah | 21709 |
| 215 | Pemerintah Kota Bengkulu | 21771 |
| 216 | Pemerintah Provinsi Lampung | 21800 |
| 217 | Pemerintah Kabupaten Lampung Barat | 21801 |

| | | |
|-----|---|-------|
| 218 | Pemerintah Kabupaten Tanggamus | 21802 |
| 219 | Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan | 21803 |
| 220 | Pemerintah Kabupaten Lampung Timur | 21804 |
| 221 | Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah | 21805 |
| 222 | Pemerintah Kabupaten Lampung Utara | 21806 |
| 223 | Pemerintah Kabupaten Way Kanan | 21807 |
| 224 | Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang | 21808 |
| 225 | Pemerintah Kabupaten Pesawaran | 21809 |
| 226 | Pemerintah Kabupaten Mesuji | 21810 |
| 227 | Pemerintah Kabupaten Pringsewu | 21811 |
| 228 | Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat | 21812 |
| 229 | Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat | 21813 |
| 230 | Pemerintah Kota Bandar Lampung | 21871 |
| 231 | Pemerintah Kota Metro | 21872 |
| 232 | Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung | 21900 |
| 233 | Pemerintah Kabupaten Bangka | 21901 |
| 234 | Pemerintah Kabupaten Belitung | 21902 |
| 235 | Pemerintah Kabupaten Bangka Barat | 21903 |
| 236 | Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah | 21904 |
| 237 | Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan | 21905 |
| 238 | Pemerintah Kabupaten Belitung Timur | 21906 |
| 239 | Pemerintah Kota Pangkal Pinang | 21971 |
| 240 | Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau | 22100 |
| 241 | Pemerintah Kabupaten Karimun | 22101 |
| 242 | Pemerintah Kabupaten Bintan | 22102 |
| 243 | Pemerintah Kabupaten Natuna | 22103 |
| 244 | Pemerintah Kabupaten Lingga | 22104 |
| 245 | Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas | 22105 |
| 246 | Pemerintah Kota Batam | 22171 |
| 247 | Pemerintah Kota Tanjungpinang | 22172 |
| 248 | Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 23100 |
| 249 | Pemerintah Provinsi Jawa Barat | 23200 |
| 250 | Pemerintah Kabupaten Bogor | 23201 |
| 251 | Pemerintah Kabupaten Sukabumi | 23202 |
| 252 | Pemerintah Kabupaten Cianjur | 23203 |
| 253 | Pemerintah Kabupaten Bandung | 23204 |
| 254 | Pemerintah Kabupaten Garut | 23205 |
| 255 | Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya | 23206 |
| 256 | Pemerintah Kabupaten Ciamis | 23207 |
| 257 | Pemerintah Kabupaten Kuningan | 23208 |
| 258 | Pemerintah Kabupaten Cirebon | 23209 |
| 259 | Pemerintah Kabupaten Majalengka | 23210 |
| 260 | Pemerintah Kabupaten Sumedang | 23211 |
| 261 | Pemerintah Kabupaten Indramayu | 23212 |
| 262 | Pemerintah Kabupaten Subang | 23213 |
| 263 | Pemerintah Kabupaten Purwakarta | 23214 |
| 264 | Pemerintah Kabupaten Karawang | 23215 |

| | | |
|-----|------------------------------------|-------|
| 265 | Pemerintah Kabupaten Bekasi | 23216 |
| 266 | Pemerintah Kabupaten Bandung Barat | 23217 |
| 267 | Pemerintah Kabupaten Pangandaran | 23218 |
| 268 | Pemerintah Kota Bogor | 23271 |
| 269 | Pemerintah Kota Sukabumi | 23272 |
| 270 | Pemerintah Kota Bandung | 23273 |
| 271 | Pemerintah Kota Cirebon | 23274 |
| 272 | Pemerintah Kota Bekasi | 23275 |
| 273 | Pemerintah Kota Depok | 23276 |
| 274 | Pemerintah Kota Cimahi | 23277 |
| 275 | Pemerintah Kota Tasikmalaya | 23278 |
| 276 | Pemerintah Kota Banjar | 23279 |
| 277 | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | 23300 |
| 278 | Pemerintah Kabupaten Cilacap | 23301 |
| 279 | Pemerintah Kabupaten Banyumas | 23302 |
| 280 | Pemerintah Kabupaten Purbalingga | 23303 |
| 281 | Pemerintah Kabupaten Banjarnegara | 23304 |
| 282 | Pemerintah Kabupaten Kebumen | 23305 |
| 283 | Pemerintah Kabupaten Purworejo | 23306 |
| 284 | Pemerintah Kabupaten Wonosobo | 23307 |
| 285 | Pemerintah Kabupaten Magelang | 23308 |
| 286 | Pemerintah Kabupaten Boyolali | 23309 |
| 287 | Pemerintah Kabupaten Klaten | 23310 |
| 288 | Pemerintah Kabupaten Sukoharjo | 23311 |
| 289 | Pemerintah Kabupaten Wonogiri | 23312 |
| 290 | Pemerintah Kabupaten Karanganyar | 23313 |
| 291 | Pemerintah Kabupaten Sragen | 23314 |
| 292 | Pemerintah Kabupaten Grobogan | 23315 |
| 293 | Pemerintah Kabupaten Blora | 23316 |
| 294 | Pemerintah Kabupaten Rembang | 23317 |
| 295 | Pemerintah Kabupaten Pati | 23318 |
| 296 | Pemerintah Kabupaten Kudus | 23319 |
| 297 | Pemerintah Kabupaten Jepara | 23320 |
| 298 | Pemerintah Kabupaten Demak | 23321 |
| 299 | Pemerintah Kabupaten Semarang | 23322 |
| 300 | Pemerintah Kabupaten Temanggung | 23323 |
| 301 | Pemerintah Kabupaten Kendal | 23324 |
| 302 | Pemerintah Kabupaten Batang | 23325 |
| 303 | Pemerintah Kabupaten Pekalongan | 23326 |
| 304 | Pemerintah Kabupaten Pemasang | 23327 |
| 305 | Pemerintah Kabupaten Tegal | 23328 |
| 306 | Pemerintah Kabupaten Brebes | 23329 |
| 307 | Pemerintah Kota Magelang | 23371 |
| 308 | Pemerintah Kota Surakarta | 23372 |
| 309 | Pemerintah Kota Salatiga | 23373 |
| 310 | Pemerintah Kota Semarang | 23374 |
| 311 | Pemerintah Kota Pekalongan | 23375 |

| | | |
|-----|--|-------|
| 312 | Pemerintah Kota Tegal | 23376 |
| 313 | Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta | 23400 |
| 314 | Pemerintah Kabupaten Kulon Progo | 23401 |
| 315 | Pemerintah Kabupaten Bantul | 23402 |
| 316 | Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul | 23403 |
| 317 | Pemerintah Kabupaten Sleman | 23404 |
| 318 | Pemerintah Kota Yogyakarta | 23471 |
| 319 | Pemerintah Provinsi Jawa Timur | 23500 |
| 320 | Pemerintah Kabupaten Pacitan | 23501 |
| 321 | Pemerintah Kabupaten Ponorogo | 23502 |
| 322 | Pemerintah Kabupaten Trenggalek | 23503 |
| 323 | Pemerintah Kabupaten Tulungagung | 23504 |
| 324 | Pemerintah Kabupaten Blitar | 23505 |
| 325 | Pemerintah Kabupaten Kediri | 23506 |
| 326 | Pemerintah Kabupaten Malang | 23507 |
| 327 | Pemerintah Kabupaten Lumajang | 23508 |
| 328 | Pemerintah Kabupaten Jember | 23509 |
| 329 | Pemerintah Kabupaten Banyuwangi | 23510 |
| 330 | Pemerintah Kabupaten Bondowoso | 23511 |
| 331 | Pemerintah Kabupaten Situbondo | 23512 |
| 332 | Pemerintah Kabupaten Probolinggo | 23513 |
| 333 | Pemerintah Kabupaten Pasuruan | 23514 |
| 334 | Pemerintah Kabupaten Sidoarjo | 23515 |
| 335 | Pemerintah Kabupaten Mojokerto | 23516 |
| 336 | Pemerintah Kabupaten Jombang | 23517 |
| 337 | Pemerintah Kabupaten Nganjuk | 23518 |
| 338 | Pemerintah Kabupaten Madiun | 23519 |
| 339 | Pemerintah Kabupaten Magetan | 23520 |
| 340 | Pemerintah Kabupaten Ngawi | 23521 |
| 341 | Pemerintah Kabupaten Bojonegoro | 23522 |
| 342 | Pemerintah Kabupaten Tuban | 23523 |
| 343 | Pemerintah Kabupaten Lamongan | 23524 |
| 344 | Pemerintah Kabupaten Gresik | 23525 |
| 345 | Pemerintah Kabupaten Bangkalan | 23526 |
| 346 | Pemerintah Kabupaten Sampang | 23527 |
| 347 | Pemerintah Kabupaten Pamekasan | 23528 |
| 348 | Pemerintah Kabupaten Sumenep | 23529 |
| 349 | Pemerintah Kota Kediri | 23571 |
| 350 | Pemerintah Kota Blitar | 23572 |
| 351 | Pemerintah Kota Malang | 23573 |
| 352 | Pemerintah Kota Probolinggo | 23574 |
| 353 | Pemerintah Kota Pasuruan | 23575 |
| 354 | Pemerintah Kota Mojokerto | 23576 |
| 355 | Pemerintah Kota Madiun | 23577 |
| 356 | Pemerintah Kota Surabaya | 23578 |
| 357 | Pemerintah Kota Batu | 23579 |
| 358 | Pemerintah Provinsi Banten | 23600 |

| | | |
|-----|---|-------|
| 359 | Pemerintah Kabupaten Pandeglang | 23601 |
| 360 | Pemerintah Kabupaten Lebak | 23602 |
| 361 | Pemerintah Kabupaten Tangerang | 23603 |
| 362 | Pemerintah Kabupaten Serang | 23604 |
| 363 | Pemerintah Kota Tangerang | 23671 |
| 364 | Pemerintah Kota Cilegon | 23672 |
| 365 | Pemerintah Kota Serang | 23673 |
| 366 | Pemerintah Kota Tangerang Selatan | 23674 |
| 367 | Pemerintah Provinsi Bali | 25100 |
| 368 | Pemerintah Kabupaten Jembrana | 25101 |
| 369 | Pemerintah Kabupaten Tabanan | 25102 |
| 370 | Pemerintah Kabupaten Badung | 25103 |
| 371 | Pemerintah Kabupaten Gianyar | 25104 |
| 372 | Pemerintah Kabupaten Klungkung | 25105 |
| 373 | Pemerintah Kabupaten Bangli | 25106 |
| 374 | Pemerintah Kabupaten Karangasem | 25107 |
| 375 | Pemerintah Kabupaten Buleleng | 25108 |
| 376 | Pemerintah Kota Denpasar | 25171 |
| 377 | Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat | 25200 |
| 378 | Pemerintah Kabupaten Lombok Barat | 25201 |
| 379 | Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah | 25202 |
| 380 | Pemerintah Kabupaten Lombok Timur | 25203 |
| 381 | Pemerintah Kabupaten Sumbawa | 25204 |
| 382 | Pemerintah Kabupaten Dompu | 25205 |
| 383 | Pemerintah Kabupaten Bima | 25206 |
| 384 | Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat | 25207 |
| 385 | Pemerintah Kabupaten Lombok Utara | 25208 |
| 386 | Pemerintah Kota Mataram | 25271 |
| 387 | Pemerintah Kota Bima | 25272 |
| 388 | Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur | 25300 |
| 389 | Pemerintah Kabupaten Sumba Barat | 25301 |
| 390 | Pemerintah Kabupaten Sumba Timur | 25302 |
| 391 | Pemerintah Kabupaten Kupang | 25303 |
| 392 | Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan | 25304 |
| 393 | Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara | 25305 |
| 394 | Pemerintah Kabupaten Belu | 25306 |
| 395 | Pemerintah Kabupaten Alor | 25307 |
| 396 | Pemerintah Kabupaten Lembata | 25308 |
| 397 | Pemerintah Kabupaten Flores Timur | 25309 |
| 398 | Pemerintah Kabupaten Sikka | 25310 |
| 399 | Pemerintah Kabupaten Ende | 25311 |
| 400 | Pemerintah Kabupaten Ngada | 25312 |
| 401 | Pemerintah Kabupaten Manggarai | 25313 |
| 402 | Pemerintah Kabupaten Rote Ndao | 25314 |
| 403 | Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat | 25315 |
| 404 | Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah | 25316 |
| 405 | Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya | 25317 |

| | | |
|-----|--|-------|
| 406 | Pemerintah Kabupaten Nagekeo | 25318 |
| 407 | Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur | 25319 |
| 408 | Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua | 25320 |
| 409 | Pemerintah Kabupaten Malaka | 25321 |
| 410 | Pemerintah Kota Kupang | 25371 |
| 411 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat | 26100 |
| 412 | Pemerintah Kabupaten Sambas | 26101 |
| 413 | Pemerintah Kabupaten Bengkayang | 26102 |
| 414 | Pemerintah Kabupaten Landak | 26103 |
| 415 | Pemerintah Kabupaten Pontianak | 26104 |
| 416 | Pemerintah Kabupaten Sanggau | 26105 |
| 417 | Pemerintah Kabupaten Ketapang | 26106 |
| 418 | Pemerintah Kabupaten Sintang | 26107 |
| 419 | Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu | 26108 |
| 420 | Pemerintah Kabupaten Sekadau | 26109 |
| 421 | Pemerintah Kabupaten Melawi | 26110 |
| 422 | Pemerintah Kabupaten Kayong Utara | 26111 |
| 423 | Pemerintah Kabupaten Kubu Raya | 26112 |
| 424 | Pemerintah Kota Pontianak | 26171 |
| 425 | Pemerintah Kota Singkawang | 26172 |
| 426 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah | 26200 |
| 427 | Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat | 26201 |
| 428 | Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur | 26202 |
| 429 | Pemerintah Kabupaten Kapuas | 26203 |
| 430 | Pemerintah Kabupaten Barito Selatan | 26204 |
| 431 | Pemerintah Kabupaten Barito Utara | 26205 |
| 432 | Pemerintah Kabupaten Sukamara | 26206 |
| 433 | Pemerintah Kabupaten Lamandau | 26207 |
| 434 | Pemerintah Kabupaten Seruyan | 26208 |
| 435 | Pemerintah Kabupaten Katingan | 26209 |
| 436 | Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau | 26210 |
| 437 | Pemerintah Kabupaten Gunung Mas | 26211 |
| 438 | Pemerintah Kabupaten Barito Timur | 26212 |
| 439 | Pemerintah Kabupaten Murung Raya | 26213 |
| 440 | Pemerintah Kota Palangka Raya | 26271 |
| 441 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan | 26300 |
| 442 | Pemerintah Kabupaten Tanah Laut | 26301 |
| 443 | Pemerintah Kabupaten Kotabaru | 26302 |
| 444 | Pemerintah Kabupaten Banjar | 26303 |
| 445 | Pemerintah Kabupaten Barito Kuala | 26304 |
| 446 | Pemerintah Kabupaten Tapin | 26305 |
| 447 | Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan | 26306 |
| 448 | Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah | 26307 |
| 449 | Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara | 26308 |
| 450 | Pemerintah Kabupaten Tabalong | 26309 |
| 451 | Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu | 26310 |
| 452 | Pemerintah Kabupaten Balangan | 26311 |

| | | |
|-----|--|-------|
| 453 | Pemerintah Kota Banjarmasin | 26371 |
| 454 | Pemerintah Kota Banjarbaru | 26372 |
| 455 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur | 26400 |
| 456 | Pemerintah Kabupaten Paser | 26401 |
| 457 | Pemerintah Kabupaten Kutai Barat | 26402 |
| 458 | Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara | 26403 |
| 459 | Pemerintah Kabupaten Kutai Timur | 26404 |
| 460 | Pemerintah Kabupaten Berau | 26405 |
| 461 | Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara | 26409 |
| 462 | Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu | 26411 |
| 463 | Pemerintah Kota Balikpapan | 26471 |
| 464 | Pemerintah Kota Samarinda | 26472 |
| 465 | Pemerintah Kota Bontang | 26474 |
| 466 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara | 26500 |
| 467 | Pemerintah Kabupaten Bulungan | 26501 |
| 468 | Pemerintah Kabupaten Malinau | 26502 |
| 469 | Pemerintah Kabupaten Nunukan | 26503 |
| 470 | Pemerintah Kabupaten Tana Tidung | 26504 |
| 471 | Pemerintah Kota Tarakan | 26571 |
| 472 | Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara | 27100 |
| 473 | Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow | 27101 |
| 474 | Pemerintah Kabupaten Minahasa | 27102 |
| 475 | Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe | 27103 |
| 476 | Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud | 27104 |
| 477 | Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan | 27105 |
| 478 | Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara | 27106 |
| 479 | Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | 27107 |
| 480 | Pemerintah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro | 27108 |
| 481 | Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara | 27109 |
| 482 | Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan | 27110 |
| 483 | Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur | 27111 |
| 484 | Pemerintah Kota Manado | 27171 |
| 485 | Pemerintah Kota Bitung | 27172 |
| 486 | Pemerintah Kota Tomohon | 27173 |
| 487 | Pemerintah Kota KotaMobaGu | 27174 |
| 488 | Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah | 27200 |
| 489 | Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan | 27201 |
| 490 | Pemerintah Kabupaten Banggai | 27202 |
| 491 | Pemerintah Kabupaten Morowali | 27203 |
| 492 | Pemerintah Kabupaten Poso | 27204 |
| 493 | Pemerintah Kabupaten Donggala | 27205 |
| 494 | Pemerintah Kabupaten Tolitoli | 27206 |
| 495 | Pemerintah Kabupaten Buol | 27207 |
| 496 | Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong | 27208 |
| 497 | Pemerintah Kabupaten Tojo Una Una | 27209 |
| 498 | Pemerintah Kabupaten Sigi | 27210 |
| 499 | Pemerintah Kabupaten Banggai Laut | 27211 |

| | | |
|-----|---|-------|
| 500 | Pemerintah Kabupaten Morowali Utara | 27212 |
| 501 | Pemerintah Kota Palu | 27271 |
| 502 | Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan | 27300 |
| 503 | Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar | 27301 |
| 504 | Pemerintah Kabupaten Bulukumba | 27302 |
| 505 | Pemerintah Kabupaten Bantaeng | 27303 |
| 506 | Pemerintah Kabupaten Jeneponto | 27304 |
| 507 | Pemerintah Kabupaten Takalar | 27305 |
| 508 | Pemerintah Kabupaten Gowa | 27306 |
| 509 | Pemerintah Kabupaten Sinjai | 27307 |
| 510 | Pemerintah Kabupaten Maros | 27308 |
| 511 | Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 27309 |
| 512 | Pemerintah Kabupaten Barru | 27310 |
| 513 | Pemerintah Kabupaten Bone | 27311 |
| 514 | Pemerintah Kabupaten Soppeng | 27312 |
| 515 | Pemerintah Kabupaten Wajo | 27313 |
| 516 | Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | 27314 |
| 517 | Pemerintah Kabupaten Pinrang | 27315 |
| 518 | Pemerintah Kabupaten Enrekang | 27316 |
| 519 | Pemerintah Kabupaten Luwu | 27317 |
| 520 | Pemerintah Kabupaten Tana Toraja | 27318 |
| 521 | Pemerintah Kabupaten Luwu Utara | 27319 |
| 522 | Pemerintah Kabupaten Luwu Timur | 27320 |
| 523 | Pemerintah Kabupaten Toraja Utara | 27321 |
| 524 | Pemerintah Kota Makassar | 27371 |
| 525 | Pemerintah Kota Parepare | 27372 |
| 526 | Pemerintah Kota Palopo | 27373 |
| 527 | Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara | 27400 |
| 528 | Pemerintah Kabupaten Buton | 27401 |
| 529 | Pemerintah Kabupaten Muna | 27402 |
| 530 | Pemerintah Kabupaten Konawe | 27403 |
| 531 | Pemerintah Kabupaten Kolaka | 27404 |
| 532 | Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan | 27405 |
| 533 | Pemerintah Kabupaten Bombana | 27406 |
| 534 | Pemerintah Kabupaten Wakatobi | 27407 |
| 535 | Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara | 27408 |
| 536 | Pemerintah Kabupaten Buton Utara | 27409 |
| 537 | Pemerintah Kabupaten Konawe Utara | 27410 |
| 538 | Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur | 27411 |
| 539 | Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan | 27412 |
| 540 | Pemerintah Kota Kendari | 27471 |
| 541 | Pemerintah Kota Baubau | 27472 |
| 542 | Pemerintah Provinsi Gorontalo | 27500 |
| 543 | Pemerintah Kabupaten Boalemo | 27501 |
| 544 | Pemerintah Kabupaten Gorontalo | 27502 |
| 545 | Pemerintah Kabupaten Pohuwato | 27503 |
| 546 | Pemerintah Kabupaten Bone Bolango | 27504 |

| | | |
|-----|--|-------|
| 547 | Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara | 27505 |
| 548 | Pemerintah Kota Gorontalo | 27571 |
| 549 | Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat | 27600 |
| 550 | Pemerintah Kabupaten Majene | 27601 |
| 551 | Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar | 27602 |
| 552 | Pemerintah Kabupaten Mamasa | 27603 |
| 553 | Pemerintah Kabupaten Mamuju | 27604 |
| 554 | Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara | 27605 |
| 555 | Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah | 27606 |
| 556 | Pemerintah Provinsi Maluku | 28100 |
| 557 | Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat | 28101 |
| 558 | Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara | 28102 |
| 559 | Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah | 28103 |
| 560 | Pemerintah Kabupaten Buru | 28104 |
| 561 | Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru | 28105 |
| 562 | Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat | 28106 |
| 563 | Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur | 28107 |
| 564 | Pemerintah Kabupaten Buru Selatan | 28108 |
| 565 | Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya | 28109 |
| 566 | Pemerintah Kota Ambon | 28171 |
| 567 | Pemerintah Kota Tual | 28172 |
| 568 | Pemerintah Provinsi Maluku Utara | 28200 |
| 569 | Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat | 28201 |
| 570 | Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah | 28202 |
| 571 | Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula | 28203 |
| 572 | Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan | 28204 |
| 573 | Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara | 28205 |
| 574 | Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur | 28206 |
| 575 | Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai | 28207 |
| 576 | Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu | 28208 |
| 577 | Pemerintah Kota Ternate | 28271 |
| 578 | Pemerintah Kota Tidore Kepulauan | 28272 |
| 579 | Pemerintah Provinsi Papua Barat | 29100 |
| 580 | Pemerintah Kabupaten Fak-Fak | 29101 |
| 581 | Pemerintah Kabupaten Kaimana | 29102 |
| 582 | Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama | 29103 |
| 583 | Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni | 29104 |
| 584 | Pemerintah Kabupaten Manokwari | 29105 |
| 585 | Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan | 29106 |
| 586 | Pemerintah Kabupaten Sorong | 29107 |
| 587 | Pemerintah Kabupaten Raja Ampat | 29108 |
| 588 | Pemerintah Kabupaten Maybrat | 29109 |
| 589 | Pemerintah Kabupaten Tambrauw | 29110 |
| 590 | Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak | 29111 |
| 591 | Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan | 29112 |
| 592 | Pemerintah Kota Sorong | 29171 |
| 593 | Pemerintah Provinsi Papua | 29400 |

| | | |
|-----|---|-------|
| 594 | Pemerintah Kabupaten Merauke | 29401 |
| 595 | Pemerintah Kabupaten Jayawijaya | 29402 |
| 596 | Pemerintah Kabupaten Jayapura | 29403 |
| 597 | Pemerintah Kabupaten Nabire | 29404 |
| 598 | Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen | 29405 |
| 599 | Pemerintah Kabupaten Biak Numfor | 29406 |
| 600 | Pemerintah Kabupaten Paniai | 29407 |
| 601 | Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya | 29408 |
| 602 | Pemerintah Kabupaten Mimika | 29409 |
| 603 | Pemerintah Kabupaten Boven Digoel | 29410 |
| 604 | Pemerintah Kabupaten Mappi | 29411 |
| 605 | Pemerintah Kabupaten Asmat | 29412 |
| 606 | Pemerintah Kabupaten Yahukimo | 29413 |
| 607 | Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang | 29414 |
| 608 | Pemerintah Kabupaten Tolikara | 29415 |
| 609 | Pemerintah Kabupaten Sarmi | 29416 |
| 610 | Pemerintah Kabupaten Keerom | 29417 |
| 611 | Pemerintah Kabupaten Waropen | 29418 |
| 612 | Pemerintah Kabupaten Supiori | 29419 |
| 613 | Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya | 29420 |
| 614 | Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah | 29421 |
| 615 | Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya | 29422 |
| 616 | Pemerintah Kabupaten Yalimo | 29423 |
| 617 | Pemerintah Kabupaten Nduga | 29424 |
| 618 | Pemerintah Kabupaten Dogiyai | 29425 |
| 619 | Pemerintah Kabupaten Deiyai | 29426 |
| 620 | Pemerintah Kabupaten Intan Jaya | 29427 |
| 621 | Pemerintah Kabupaten Puncak | 29428 |
| 622 | Pemerintah Kota Jayapura | 29471 |

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

EKO SUTRISNO